



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Buton Utara

## **PENETAPAN REVIEW IKU SASARAN STRATEGIS**

Tahun 2016 – 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kompleks Perkantoran Sara'ea - Buranga



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No...Tlp/Fax.. Kode Pos 93682*  
**BURANGA**

---

**PENETAPAN**  
**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**TAHUN 2016-2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA**

**BURANGA, Februari 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No...Tlp/Fax.. Kode Pos 93682*  
**BURANGA**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
NOMOR: TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

DINAS DINAS PENANAMA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Februari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga  
Pada Tanggal : Februari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buton Utara



**ALIMIN, S.Sos, M.Eng**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19721231 199303 1 028

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : FEBRUARI 2019  
Lampiran 1 :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**TUGAS POKOK**

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara tersebut adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**FUNGSI**

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi di bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Búton Utara



**ALIMIN, S.Sos, M.Eng**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19721231 199303 1 028

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : FEBRUARI 2019

Lampiran 2 :

REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

**TABEL 1. IKU 2016 - 2021**

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sat	Kondisi Awal 2015	Target Renstra						Kondisi Akhir Periode Renstra	Sumber Data
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya nilai investasi daerah	Pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN/No n	Jumlah nilai investasi pada tahun bersangkutan	Milyar Rp	33	3.144	39,3	14,9	15	15,2	15,4	3.244	Laporan Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Bidang Pengendalian Informasi PM
Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, tepat dan akuntabel	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	$\frac{\text{jumlah izin yg diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pd SOP}}{\text{jumlah Izin yang dikeluarkan}} \times 100$	%	85	90	90	92	92	95	95	95	Laporan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Bobot	0	0	78	80	82	83	84	85	Laporan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : FEBRUARI 2019

Lampiran 3 :

**MATRIX CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2016-  
2021**



**BERITA ACARA  
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019**

**Nomor :**

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami Tim Reviu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Nomor :                      Tanggal                      , telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. TUJUAN**

**1. Uraian Tujuan Sebelum Reviu**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat</b>	Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal yang efektif dan efisien
	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien
	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dengan memberikan rasa nyaman dan kemudahan didalam pengurusan perizinan bagi investor

**2. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan**

1. Meningkatnya nilai investasi daerah
2. Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perizinan

**3. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>TUJUAN (setelah reviu)</b>
1. Meningkatnya nilai investasi daerah
2. Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perizinan

## II. SASARAN

### a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja
	2. Terkendali dan terbinanya Penanaman Modal Perusahaan PMDN
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dengan memberikan rasa nyaman dan kemudahan didalam pengurusan perizinan bagi investor	Terciptanya pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus izin berbasis teknologi informasi

### b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, tepat dan akuntabel

### c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (setelah reviu)
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, tepat dan akuntabel

## III. INDIKATOR KINERJA SASARAN

### a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)
	Rasio daya serap tenaga kerja
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Terkendali dan terbinanya Penanaman Modal Perusahaan PMDN	Jumlah Potensi/Peluang Investasi
	Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Jumlah Izin yang diterbitkan
	Jangka waktu/Lamanya proses perizinan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan
	Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu
Terciptanya pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus izin berbasis teknologi informasi	Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja**

1. Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas
2. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan

**c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)</b>
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
Rasio daya serap tenaga kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	
Jumlah Potensi/Peluang Investasi	
Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina	
Jumlah Izin yang diterbitkan	
Jangka waktu/Lamanya proses perizinan	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan	
Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu	
Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online	

#### IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

##### a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)
	Rasio daya serap tenaga kerja
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Terkendali dan terbinanya Penanaman Modal Perusahaan PMDN	Jumlah Potensi/Peluang Investasi
	Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Jumlah Izin yang diterbitkan
	Jangka waktu/Lamanya proses perizinan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan
Terciptanya pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus izin berbasis teknologi informasi	Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu
	Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online

##### b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU

Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas
Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan

##### c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
Rasio daya serap tenaga kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	
Jumlah Potensi/Peluang Investasi	

Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina	
Jumlah Izin yang diterbitkan	
Jangka waktu/Lamanya proses perizinan	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan	
Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu	
Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online	

## V. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Alasan (sebelum reviu)</b>	<b>Cara Pengukuran (sebelum reviu)</b>	<b>Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)</b>
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Bisa diukur	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	Bisa diukur	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
Rasio daya serap tenaga kerja	Bisa diukur	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN	
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Bisa diukur	Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi x 100% Realisasi PMDN sebelum evaluasi	
Jumlah Potensi/Peluang Investasi	Bisa diukur	Jumlah Potensi/Peluang Investasi	
Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina	Bisa diukur	Jumlah PMDN yang akan dipantau, diawasi dan di bina	
Jumlah Izin yang diterbitkan	Bisa diukur	Jumlah Izin yang diterbitkan	

Jangka waktu/Lamanya proses perizinan	Bisa diukur	Jangka waktu/Lamanya proses perizinan	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan	Bisa diukur	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kualitas Pelayanan Perizinan	
Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu	Bisa diukur	Jenis Izin Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu	
Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online	Bisa diukur	Jumlah izin yang diterbitkan dengan fasilitas online	

**b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS**

Jumlah nilai invesatsi pada tahun bersangkutan
Jumlah izin yg diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pd SOP dibagi Jumlah Izin yang dierbitkan dikali 100%
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

**c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Alasan (setelah reviu)</b>	<b>Cara Pengukuran (setelah reviu)</b>	<b>Keterangan / Kriteria (setelah reviu)</b>
Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas (Milyar Rp)	Indikatornya bisa diukur serta mewakili capaian beberapa program	Jumlah nilai invesatsi pada tahun bersangkutan	
Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu (%)	Indikatornya bisa diukur serta mewakili capaian beberapa program	Jumlah izin yg diterbitkan seuai dengan waktu yang ditetapkan pd SOP dibagi Jumlah Izin yang dierbitkan dikali 100%	
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan	Indikatornya bisa diukur serta mewakili capaian beberapa program	terhadap Pelayanan Perizinan	

## VI. TARGET KINERJA

### a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	0	1	2	1	1	1	1	7
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	Rp	0	3.145	39,3	3.793	14	14,2	14,7	7.020 M
3. Rasio daya serap tenaga kerja	-	0	8000	40	249	10	12	15	1.189
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	0	3.145	(3.105)	3.753	(3.779)	2	5	7.020

### b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas
Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan

### c. Rincian Target Indikator Kinerja(IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas	(Milyar Rp)	33	14,7	14,8	14,9	15	15,2	15,4	90
2. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	(%)	85	90	90	92	92	95	95	95
3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan	Point	0	0	78	80	82	83	84	85

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **2016-2021 Hasil Reviu Tahun 2019**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN/Non Fasilitas	(Milyar Rp)	33	14,7	14,8	14,9	15	15,2	15,4	90
2	Mewujudkan pelayanan yang prima dibidang perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, tepat dan akuntabel	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	(%)	85	90	90	92	92	95	95	95
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Perizinan	Point	0	0	78	80	82	83	84	85

<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Buton Utara</p> <p><b>ALIMIN, S.Sos, M.Eng</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19721231 199303 1 028</p>	Buranga, 04 Februari 2019		
	Tim Reviu Renstra dan IKU DPMPTSP :		
	1. Ketua Tim	LA SUKRENING, S.Pd	1
	2. Anggota	GUSLIN, S.Pi, M.Si	2
	3. Anggota	WA ODE UMUL HAIR, SH	3
4. Narasumber	SITTI DHARMA, SE, MM	4	



